

DINAS SOSIAL

Kabupaten Serang



LKIP

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah

TAHUN 2024

(0254) 200304

Jl. Raya Petir - Serang, Curug,
Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171

dinsos@serangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2024.

Dokumen Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Serang ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban OPD dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, juga merupakan pengukuran capaian kinerja yang difokuskan pada pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2024.

Dokumen Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Serang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun selanjutnya, dan tolak ukur target pencapaian kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Serang serta dapat lebih mensinergikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang - bidang di Dinas Sosial Kabupaten Serang demi peningkatan kesejahteraan sosial melalui penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Serang dan juga dapat menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Aamiin.



Serang, 03 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG**

Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si

NIP. 19721023 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISTILAH	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.3 Sistematika Penulisan	6
1.4 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Rekomendasi.....	42

DAFTAR ISTILAH

Daerah	Daerah Kabupaten Serang
Pemerintah Daerah	Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Daerah
Pemerintah Daerah	Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Bupati	Bupati Serang
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
Fakir Miskin	Seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan
Penyandang disabilitas	Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental
Lanjut Usia Terlantar	Seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
Anak Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
Anak Jalanan	Seorang anak yang berusia 5-18 tahun dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan.

Anak Disabilitas	Seseorang yang berusia 18 tahun kebawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental
Anak Korban Kekerasan/Diperlakukan Salah	Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan kekerasan diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang – ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi/jasa.
Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencharian dan tempat tinggal yang tetap serta menghambata ditempat umum.
Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
Pemulung	Orang – Orang yang melakukan pekerjaan mengais langsung dan pendaur ulang barang bekas.
Kelompok Minoritas	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial seperti homo (gay), waria.

Bekas Warga Bina Lembaga Pemasyarakatan	Seorang yang telah selesai atau dalam tiga bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
Orang dengan HIV/AIDS	Orang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan dukungan dan pengobatan yang mencapai kualitas hidup yang optimal
Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang-orang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk ,diperdaya, ditipu,dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
Korban Tindak Kekerasan	Orang (baik individu,keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan,baik sbagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah,eksploitasi,diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Pekerja migrant internal dan lintas Negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan ,eksploitasi,penelantaran,pengusiran (deportasi),ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di Negara tempatnya dia bekerja ,sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi social.
Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,tsunami,gunung meletus,banjir,kekeringan,angin topan, dan tanah longsor.
Korban Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan Dokumen yang memuat pertanggungjawaban OPD dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Disamping Laporan Tahunan yang secara rutin disusun pada akhir tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing Instansi Pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal, yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya dari tahun ketahun. Melalui LKIP Dinas Sosial Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk Tahun selanjutnya.

Agar laporan pertanggungjawaban Pemerintah lebih sistematis dan akuntabel dalam menyampaikan capaian kinerja dari setiap instansi/OPD maka ditetapkan pedoman terbaru melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

1.2.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Serang Kabupaten Serang Nomor 99 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang, Dinas Sosial mempunyai Tugas Pokok yaitu sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Sosial dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1.2.2. Fungsi

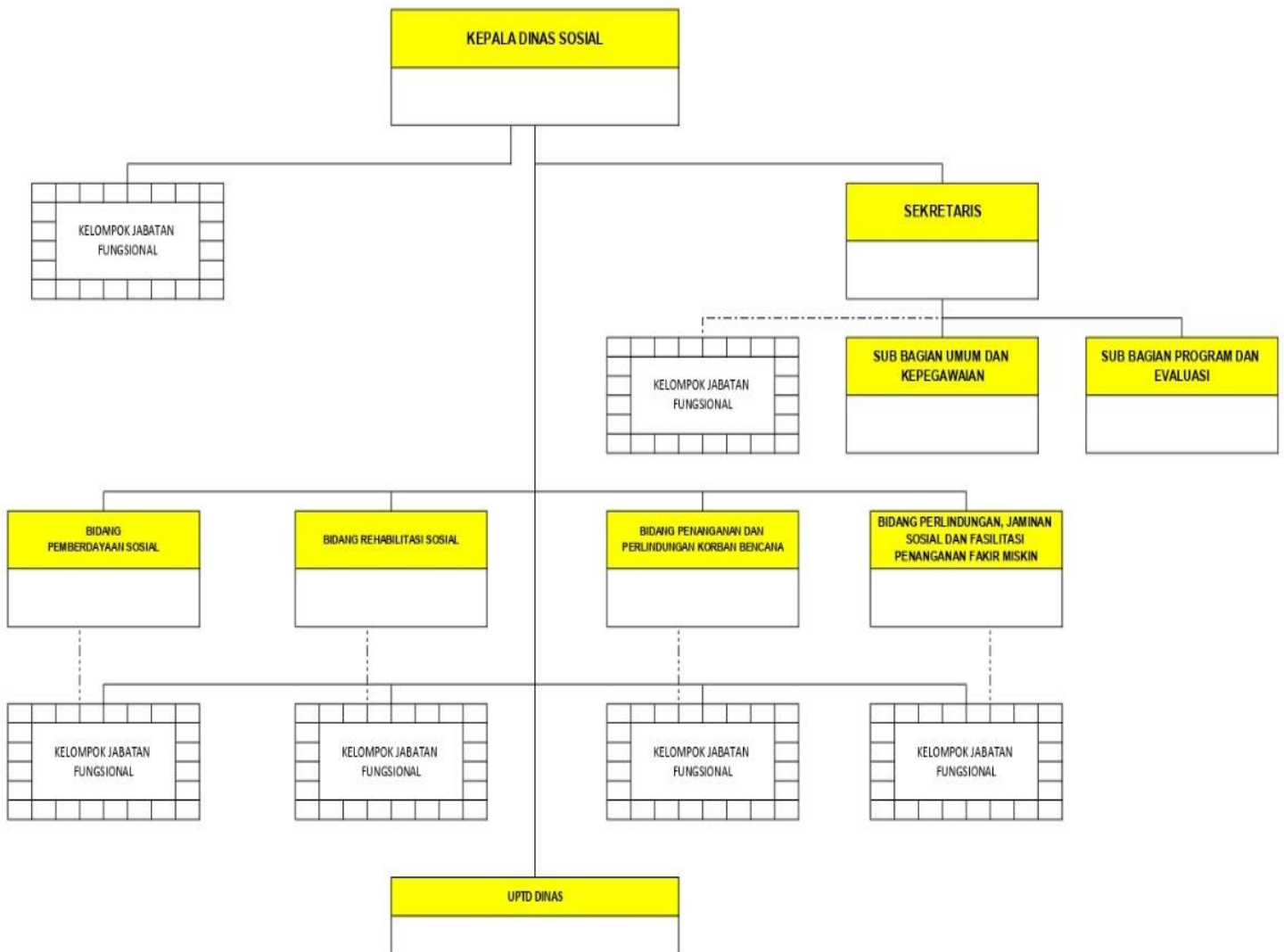
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Serang mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Kegiatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan dan Perlindungan Korban Bencana serta bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Fasilitas Penanganan Fakir Miskin;
2. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam Kegiatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan dan Perlindungan Korban Bencana serta bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Fasilitas Penanganan Fakir Miskin
3. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan dan Perlindungan Korban Bencana serta bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Fasilitas Penanganan Fakir Miskin.
4. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan dan Perlindungan Korban Bencana serta bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Fasilitas Penanganan Fakir Miskin.

1.2.3. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Serang Kabupaten Serang Nomor 99 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang, struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana gambar Struktur Organisasi dibawah ini :

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG



Sumber : Peraturan Bupati Serang Kabupaten Serang Nomor 99 Tahun 2022

1.2.4. Daya Dukung

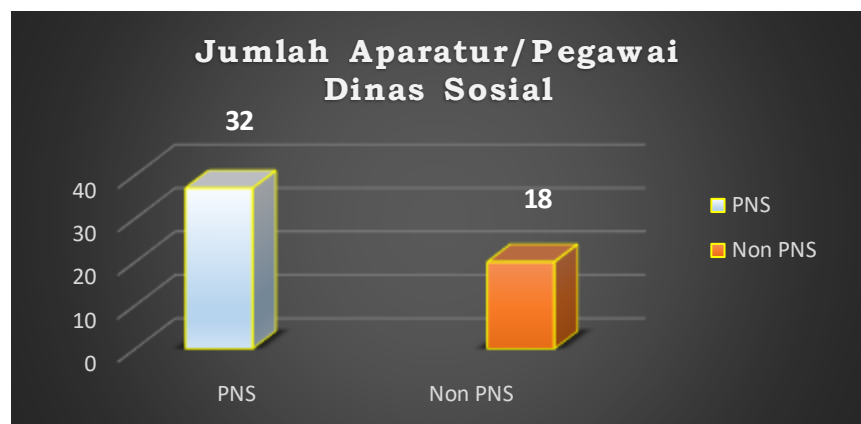
1.2.4.1. Daya Dukung Aparatur

Untuk menjalankan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang sudah tertuang dalam Rencana Straregis Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026, di dukung oleh sejumlah aparatur/pegawai dan juga mitra kerja yang membantu dilapangan sebagai berikut:

1. Jumlah aparatur/pegawai Dinas Sosial sebagaimana tergambar dalam diagram dibawah ini:

Gambar 2 Table Grafik

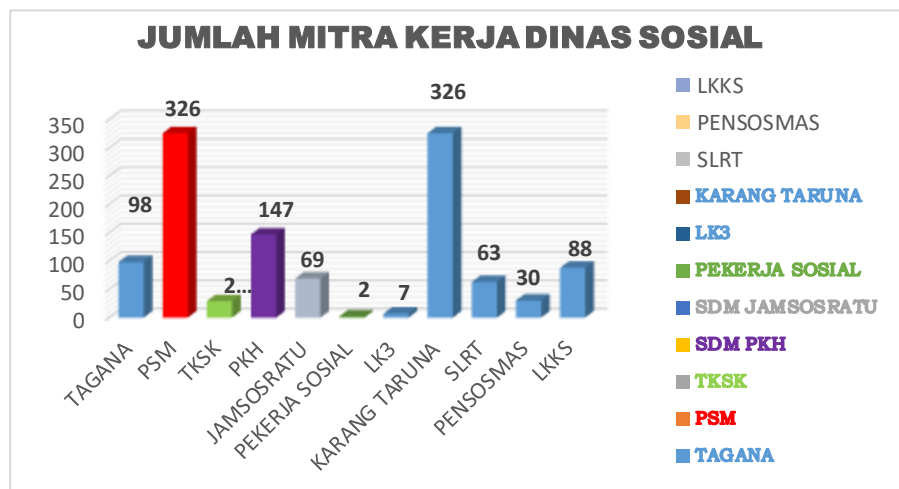
Jumlah Aparatur/Pegawai Dinas Sosial Kab. Serang



2. Mitra Kerja Dinas Sosial sebagaimana tergambar dalam diagram dibawah ini:

Gambar 3 Table Grafik

Jumlah Mitra Kerja Dinas Sosial



1.2.4.2. Sarana dan Prasarana

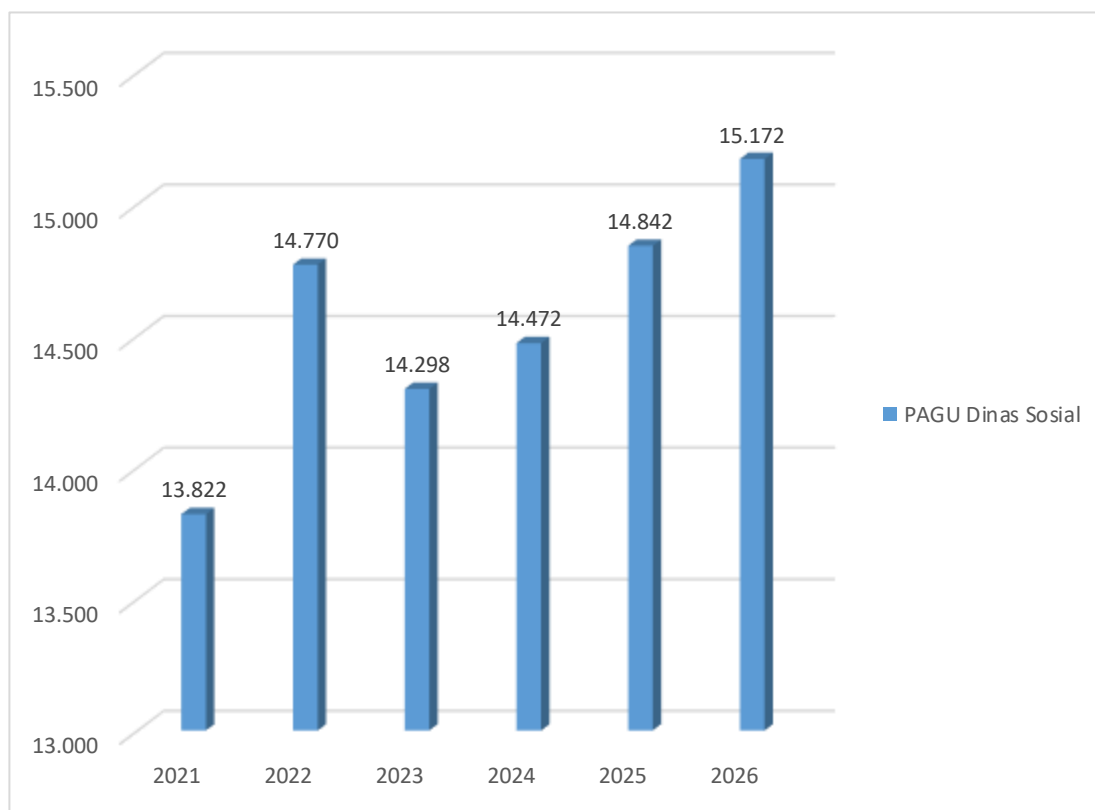
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Serang berlokasi di Jl. Raya Serang – Petir No.1 Desa Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang, dan menempati tanah dengan luas 4.770 m², bangunan yang menjadi bagian dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Serang terdiri dari 1 unit bangunan kantor utama, 1 unit bangunan ruang pertemuan (aula rapat), 1 unit Rumah Perlindungan Sosial dan Loka Bina Karya (RPS-BLK), serta di dukung dengan berbagai kendaraan operasional baik kendaraan roda dua (Motor) dan kendaraan roda empat (mobil) dan sarana pendukung lainnya.

1.2.4.1. Anggaran

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Serang dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, tergambar dalam tabel grafik sebagai berikut:

Gambar 4 Table Grafik

Pagu Dinas Sosial dari Tahun 2021 s/d Tahun 2026 (Dalam Milyar Rupiah)



1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut sistematika penulisan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2024:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi
- 1.3 Sistematika Penulisan
- 1.4 Isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

1.4. Isu Strategis

Isu Strategis yang diangkat oleh Dinas Sosial berdasarkan rumusan isu strategis yang ada di RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 dalam urusan Sosial dan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS sehingga jumlah PMKS masih cukup tinggi.
2. Jumlah PMKS di Kabupaten Serang masih cukup tinggi, sehingga proses penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan PMKS masih terbatas seperti rumah singgah atau shelter rumah aman Kabupaten Serang belum ada.
4. Pengelolaan database PMKS khususnya fakir miskin belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak PMKS khususnya fakir miskin belum mendapatkan program pelayanan sosial.
5. Belum terkoordinasinya pengentasan kemiskinan antar lembaga di Kabupaten Serang.
6. Masih terbatasnya program pemberdayaan ekonomi bagi PMKS khususnya fakir miskin.
7. Kurangnya tenaga profesi pekerja sosial.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, maka Dinas Sosial mempunyai tugas yang tidak ringan, maka sudah barang tentu di perlukan sinergitas semua pemangku kebijakan, stakeholder dan peran masyarakat dalam menjawab tantangan tersebut. Kemudian peningkatan bagi pembangunan urusan bidang sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, OPD berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional.

Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Visi pembangunan Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS”

Visi tersebut di atas dijabarkan kedalam 6 (*Enam*) Misi Pembangunan Kabupaten Serang Periode Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan dan Layanan Pendidikan Yang Bermutu disetiap Jalur dan Jenjang Pendidikan serta Melestarikan dan Mengembangkan Tradisi Budaya sebagai Kearifan Lokal yang Tumbuh dan Hidup di Tengah Masyarakat.
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau yang didukung oleh Tenaga Kesehatan yang Profesional.
3. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang dan Pemukiman yang Memadai dan Berkualitas.
4. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Pelayanan Publik yang Prima didukung Kapasitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional dengan dilandasi oleh Keadilan dan Kesetaraan Gender.
6. Memantapkan Fungsi dan Peran Agama sebagai Landasan Moral dan Spiritual dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat dan Bernegara.

Dinas Sosial sebagai instansi yang menangani urusan sosial yang juga berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan maka akan melaksanakan atau mengampu 1 (Satu) Misi, yaitu Misi ke 4 yaitu

“Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan”.

Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan misi ke 4 (*Empat*) diatas tentu dalam hal penanggulangan kemiskinan, dimana Dinas Sosial berperan dan berfungsi sebagai instansi yang lebih focus dalam penanganan kesejahteraan social terutama penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan misi Pembangunan Kabupaten Serang yang ke empat diatas , maka tujuan yang akan di capai Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 yaitu:
“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.

Berdasarkan tujuan yang akan di capai Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 diatas, maka yang menjadi sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah:
“Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial”

Untuk mengukur capaian sasaran strategis diatas maka ditetapkan Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program, maupun Indikator Kinerja Kegiatan beserta targetnya yang dijabarkan dan ditentukan setiap Tahun.

Berikut rekapitulasi mulai dari Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut target Tahun 2024, sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
beserta Target Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial	3%

Untuk memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama diatas maka ditetapkan Program Program yang akan dilaksanakan, berikut sasaran dan Indikator Kinerja Program sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:

Tabel 2.2
Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024 (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	Tingkat Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial	7,23

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Validasi Data Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Kondisi yang lebih baik Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100

Untuk memenuhi capaian target kinerja sasaran juga di tetapkan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang, berikut rekapan Kegiatan Kegiatan dan anggaran Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan & Anggaran Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.278.150
	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.183.299.000
	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	594.414.072
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.629.459
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.337.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	13.538.750
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.052.267.053
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan.	5.950.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	136.462.803
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	91.713.602
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1.421.957.364
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	749.420.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	42.399.700
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	80.726.350
Jumlah		11.521.393.303

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan perjanjian kinerja yang dibuat setiap tahunnya yaitu sebagai:

1. Akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
2. Wujud nyata komitmen
3. Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise
6. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja didasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2024, berikut rekap Program sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rekap Program dan Anggaran
Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang
Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.926.957.681	5 Kegiatan 19 Sub Kegiatan
2.	Pemberdayaan Sosial	1.065.805.803	2 Kegiatan 5 Sub Kegiatan
3.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	5.950.000	1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan
4.	Rehabilitasi Sosial	228.176.405	2 Kegiatan 15 Sub Kegiatan
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.421.957.364	1 Kegiatan 3 Sub Kegiatan

6.	Penanganan Bencana	791.819.700	2 Kegiatan 4 Sub Kegiatan
7.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	80.726.350	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan
Jumlah		11.521.393.303	14 Kegiatan 49 Sub Kegiatan

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2024 tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan capaian Indikator Kinerja Utama, Capaian Kinerja Program dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan, pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti dan menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026.

Tolok ukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis dapat dilihat dari capaian Indikator Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Serang, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Gambaran Misi yang diampu, Tujuan, Sasaran Strategis
serta Indikator Sasaran (IKU)

Misi 4	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan
Tujuan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan social
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial

Adapun analisa dari capaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi Bupati Serang yang ke 4, melalui capaian target indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisa Capaian Sasaran Strategis
Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang
Tahun 2021 – 2026

Indikator Kinerja Utama	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial	3	3,85	128	3	3,05	101,7	3	1,7	56,67	3	2,71	90,33	3			3		

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Kinerja Utama)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial	3	2,71 %	90,33 %

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur dalam penanganan/penanggulangan kemiskinan khususnya penanganan atau penurunan jumlah PMKS yang ada di wilayah Kabupaten Serang.

Capaian target Indikator Kinerja Utama dapat terpenuhi melalui 3 program, sebagaimana dapat terlihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Program yang mempengaruhi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial	7,23	1,30	17,98
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Validasi Data Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08	0,08	100
Penanganan Bencana	Meningkatnya Kualitas Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	94,68	94,68

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	Tingkat Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	100	97,30	97,30
Pemberdayaan Sosial	Persentase Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80	60	75,00
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	100	100	100

Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial	7,23	1,30	17,98
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Validasi Data Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08	0,08	100
Penanganan Bencana	Meningkatnya Kualitas Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	94,68	94,68
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Meningkatnya Kondisi yang lebih baik Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100	100	100

Untuk dapat memenuhi capaian dari berbagai target indikator yang sudah di tentukan dari masing-masing program, hal tersebut dicapai dari berbagai kegiatan-kegiatan dan Sub Kegiatan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing masing bidang, berikut penjabarannya:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program pemberdayaan sosial memiliki pagu sebesar Rp. 1.065.805.803 dengan realisasi sebesar Rp. 1.062.686.403 atau capaian sebesar 99,71. Program ini dilaksanakan melalui Dua Kegiatan dan lima Sub kegiatan, diantaranya :

1). Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota,

Dengan pagu Rp. 13.538.750 - dan realisasi sebesar Rp. 10.634.750 - atau capaian sebesar 78,55%.

- **Output Kegiatan** yaitu Sosialisasi Penerbitan Izin PUB dan UGB

Kegiatan ini memiliki Satu Sub kegiatan, Yaitu :

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Dengan pagu Rp. . 13.538.750 - dan realisasi sebesar Rp. 10.634.750 - atau capaian sebesar 78,55%.

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu Sosialisasi Penerbitan Izin PUB dan UGB

2). Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota,

Dengan pagu Rp. 1.052.267.053,- dan realisasi sebesar Rp. 1.052.051.653 - atau capaian sebesar 99,98 %.

- **Output Kegiatan** yaitu rapat Pembinaan, Rapat Rutin, dan Rapat Koordinasi Mitra Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Serang

Kegiatan ini memiliki Lima Sub kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota.

Dengan pagu Rp. 416.486.400 -, dan realisasi sebesar Rp 416.483.500 - atau capaian sebesar 100%.

- **Ouput Sub Kegiatan** ini yaitu rapat rutin dan pemberian tali asih kepada TKSK sebanyak 12 kali dalam satu tahun..

b) Sub Kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota.

Dengan pagu Rp. 1.920.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.920.000,- atau capaian sebesar 100 %.

- **Output Sub Kegiatan** Ini yaitu Rapat Koordinasi Pengurus PKH dalam melaksanakan penyaluran Program PKH dari pusat agar tepat sasaran.

c) Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota.

Dengan pagu Rp. 611.878.753 - dan realisasi sebesar Rp. 611.692.153 - atau capaian sebesar 99,97 %.

- **Ouput Sub Kegiatan** ini yaitu pemberian Hibah kepada Karangtaruna kabupaten Serang, Pemberian honorarium petugas pelayanan, perjalanan dinas, dan pembelian alat tulis kantor.

d) Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

Dengan pagu Rp. 21.981.900 dan realisasi sebesar Rp 21.956.000 atau capaian sebesar 99,88%.

- **Ouput Sub Kegiatan** ini yaitu pemberian honorairum kepada petugas LK3 yang berjumlah 7 orang , pembelian Alat tulis kantor dan perjalanan Dinas

2. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan memiliki pagu sebesar *Rp. 80.726.350* dengan realisasi *Rp. 80.166.550* atau capaian sebesar 99,31 %.

Program ini dilaksanakan melalui satu Kegiatan dan 2 sub kegiatan diantaranya :

1). Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota,

Dengan pagu sebesar *Rp. 80.726.350* dan realisasi sebesar *Rp. 80.166.550,-* atau capaian sebesar 99,31 %.

- **Output Kegiatan** yaitu Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan dengan sub kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

Dengan pagu sebesar *Rp 54.726.350* dan realisasi sebesar *Rp 54.166.550,-* atau capaian sebesar 98,98%.

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu pemeliharaan 3 (tiga) tugu perjuangan yang berlokasi di kecamatan Pabuaran, Padarincang dan Anyer. Serta Pemeliharaan taman makam Ki Syam'un dan SA Tirtayasa.

b) Sub Kegiatan pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

Dengan pagu sebesar *Rp. 26.000.000* dan realisasi sebesar *Rp. 26.000.000* atau capaian sebesar 100 %.

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu pemberian honorarium Penjaga makam taman makam Ki Syam'un dan SA Tirtayasa.

Dokumentasi Aktivitas Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan



3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan memiliki pagu Rp. 5.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.925.000 - atau capaian sebesar 99,58%.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan satu sub kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/Desa Asal,

Dengan pagu Rp. 5.950.000, dan realisasi Rp. 5.925.000 - atau capaian sebesar 99,58%.

- **Output Kegiatan** yaitu Pemberian Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/Desa Asal.

Dengan Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal

Dengan pagu Rp5.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.925.000 atau capaian sebesar 99,58%.

- **Output Sub Kegiatan** yaitu Pemberian 4 Orang Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/Desa Asal

Tabel 3.6
Rincian Data Migran Korban Tindak Kekerasan Tahun 2024

No	Nama Lengkap	Alamat	Keterangan
1	Sukmanah	Kp. Karang Anyar RT 007 / RW 003. Ds Tirem, Kecamatan Lebakwangi - Kabupaten Serang	TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
2	Arifah	Kp. Pasir Luhur RT 006/RW 003. Ds Junti, Kecamatan Jawilan - Kabupaten Serang	TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
3	Ruminah	Kp. Munjul RT 009/RW 003. Ds Harundang, Kecamatan Cikeusul - Kabupaten Serang	TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
4	Muzayanah	Kp. Walikukun RT 021/002. Ds Walikukun, Kecamatan Cikeusul - Kabupaten Serang	TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program Rehabilitasi sosial memiliki pagu sebesar Rp. 228.176.405 dengan realisasi Rp. 171.383.897 atau capaian sebesar 75,11 %.

Program ini dilaksanakan melalui 2 Kegiatan dan 15 Sub kegiatan diantaranya :

1). Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial

Output Kegiatan yaitu pemberian layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial. Dengan Sub Kegiatan yaitu :

Tabel 3.7
Rincian capaian sub kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial

No	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan Permakanan	24.117.400	19.630.000	81,39
2	Penyediaan Sandang	12.329.600	6.145.000	49,84
3	Penyediaan Alat Bantu	6.000.000	1.775.000	29,58
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	4.700.000	2.325.000	49,47
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	47.660.803	23.391.795	49,08
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	24.055.000	17.993.000	74,80
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.900.000	2.650.000	67,95
8	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	3.975.000	3.350.000	84,28
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.625.000	1.800.000	32,00
10	Pemberian Layanan Rujukan	4.100.000	3.800.000	92,68
Jumlah		136.462.803	82.859.795	60,72

Tabel 3.8
Rincian Data Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan
Pengemis di luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya.

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis PMKS (Orang)				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
1	Penyediaan Permakanan	42	5	30	-	77
2	Penyediaan Sandang	42	5	30	-	77
3	Pemberian Alat Bantu	42	5	30	-	77
4	Pelayanan Reunifikasi keluarga	42	5	30	-	77
5	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial	42	5	30	-	77
6	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga	42	5	30	-	77
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	42	5	30	-	77
8	Penelusuran Keluarga	42	5	30	-	77
9	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	42	5	30	-	77
10	Rujukan	42	5	30	-	77
J u m l a h		42	5	30	-	77

Dengan demikian dari data diatas menerangkan bahwa jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya sejumlah 77 Orang, 42 Orang untuk Disabilitas terlantar, 5 orang untuk Anak terlantar, 30 Orang untuk Lanjut usia terlantar dan Gelandang Pengemis 0 Orang. Pagu anggaran Sebesar Rp. 136.462.803 dan realisasi sebesar Rp. 82.859.795 atau capaian anggaran sebesar 60,72%.

2). Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial

Dengan pagu sebesar Rp. 91.713.602,- dan realisasi sebesar Rp 88.524.102 atau capaian sebesar 96,52 %.

- **Output Kegiatan** yaitu Pemberian bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial kepada 69 PMKS yang ditangani

a) Sub Kegiatan Layanan Kedaruratan

Dengan pagu sebesar Rp. 2.575.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.100.000 atau capaian sebesar 81,55 %.

Output Sub Kegiatan ini yaitu pemberian layanan kedaruratan kepada PMKS lainnya yang membutuhkan layanan kedaruratan. Dengan data dibawah ini :

Tabel 3.9
Rincian Data Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti social yang mendapatkan layanan Kedaruratan.

No	Nama Lengkap	Alamat	Jenis PMKS
1	Warisan bin Sabin Muhdar	Kp. Sambi Landak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
2	Adi Muhadi bin Muklis	Kp. Cipanas, Ds. Batukuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
3	Alkandi Riski Rahmadani bin Fahrudin	Kp. Tangsi, Ds. Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
4	Bayu Ravenda bin Sukmajaya	Kp. Lakbas Gantung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
5	Jaga Radika bin Handi	Kp. Sambilandak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
6	Muhada Zaenal Arifin bin Mahmud	Kp. Cipanas, Ds. Batukuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
7	Lutvi Nurwansyah bin Selamat	Kp. Cipanas, Ds. Batukuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
8	Muhamad Arifin bin Hasanudin	Kp. Cipanas, Ds. Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
9	Arda Saputra bin Muhrisi	Kp. Cipanas, Ds. Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
10	Fahmi Ardiansyah bin Asfuri	Kp. Cipanas Masjid, Ds. Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)

11	Ilfandi bin Ahmad Hatta	Kp. Sinangmangu, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
12	Nur Ilham bin Ahmad Dhani	Kp. Cipanas Baru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
13	Dzimar El Hakim bin Sam'un	Kp. Sinang Mangu, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
14	Ahmad Khotman bin Sobari	Kp. Gunung Kenceng, Ds. Batukuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
15	Agus Salim bin Robani	Kp. Pasir Lor, Ds. Cigedong, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
16	Angga Faiza Pratama	Kp. Sukamaju RT 02/ RW 02, Ds. Sukajadi, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik (Tawuran)
17	Fitri Yulianti	Kp. Bojonglo RT 001/RW 001, Ds. Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual

b) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Dengan pagu sebesar *Rp. 18.350.000,-* dan realisasi sebesar *Rp. 18.150.000 -* atau capaian sebesar 98,91 %.

Output Sub Kegiatan ini yaitu pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial kepada PMKS lainnya.

Tabel 3.10

Rincian Data Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti social yang mendapatkan layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

No	Nama Lengkap	Alamat	Jenis PMKS
1	Alfaro Atthar Wongso	Kp. Sanggreng RT 007/RW 004 Ds. Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik
2	Citra Ayu Lestari	Kp. Babakan Ciomas RT 011/RW 005 Ds. Pondok Kahuru, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
3	Lasih	Kp. Sanggreng RT 007/RW 004 Ds. Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
4	Syamziatun Asifa	Kp. Panosogan RT 002/RW 002 Ds. Panosogan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual

5	Ayu Sinta	Kp. Cibecet RT 10/RW 04, Ds. Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
6	Dimas Anugrah	Kp. Sukadami RT 04/RW 02 Ds. Malabar, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik
7	Nurul Aulia Nisa	Kp. Bayur Kidul RT 008/RW 002, Ds. Pangawinan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
8	Angga Faiza Pratama	Kp. Sukamaju RT 02/ RW 02, Ds. Sukajadi, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik
9	Riska	Kp. Cilandak Kondang RT 002/RW 002, Ds. Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang.	ABH Kekerasan Seksual
10	Tia Nur Aisah	Kp. Setu Pasar RT 001/RW 001, Ds. Sambilawang, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
11	Lam'atul	Kp. Cigelam RT 001/RW 001, Ds. Cigelam Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
12	Atun Hasanah	Kp. Singamerta RT 002/RW 001, Ds. Singamerta, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
13	Bella Sevia	Kp. Makambata II RT 012/RW 006 Ds. Sukadalem, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
14	Salwa Khaerunisa	Kp. Banjar Sari RT 001/RW 003 Ds. Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
15	Shota Shoba	Kp. Kuaron Sawah RT 004/RW 001 Ds. Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
16	Riski Permana	Kp. Nyompok Tengah RT 005/RW 003 Ds. Nyompok, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik
17	Suhendra	Kp. Kejeroan RT 007/RW 002, Ds. Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
18	Kasbiyah	Kp. Jambu RT 008/RW 003, Ds. Bendung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
19	Yulis	Kp. Kiamar RT 007/RW 003. Ds. Wanakarta, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
20	Qila Husna Khumairah	Kp. Cibadak RT 016/RW 005, Ds. Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual

21	Suci	Kp. Katupang Sinyar RT 003/RW 001, Ds. Sukamaju, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
22	Ahmad Jumni	Ds Damping, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Fisik
23	Cantika Gesiha Kirana	Pondok Cilegon Indah Blok C60 No.3 RT 004/RW 00, Ds. Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
24	Azqiya Ribina Fenelyn	Kp. Kukun RT 001/RW 002, Ds. Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
25	Munawaroh	Kp. Pasir Jambu RT 007/RW 003, Ds. Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
26	Salmah	Kp. Sukadiri RT 018/RW 004, Ds. Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual
27	Safira Citra Permata	Kp. Warung Selikur RT 003/RW 001, Ds Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang	ABH Kekerasan Seksual

c) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Dengan pagu sebesar Rp. 26.629.500,- dan realisasi sebesar Rp. 24.115.000 - atau capaian sebesar 90.56%.

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu pemberian bantuan sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya.

Tabel 3.11

Rincian Data Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti social yang mendapatkan layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

No	Nama Lengkap	Alamat	Jenis PMKS
1	Nesya Aulia Nauroh	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
2	Dewi Nur Safika	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
3	Kartinah	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
4	Saimah	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
5	Meli Yulianti	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
6	Siti Khaerun Nisa	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)

7	Arumi Fadilah	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
8	Diana Eka Putri	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
9	Rizka P.P	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
10	Siti Hapsah	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
11	Dinda Amelia	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
12	Nadin Kasela	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
13	Diyan Isnaeni	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
14	Subihat	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
15	Lia Ananta	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
16	Nuraini Purnamasari	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
17	Ana Lutpiana	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
18	Lagia Nazwa	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
19	Wahyu Aditya	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
20	Mujahidin	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
21	Muhammad Teguh	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
22	Muhammad Rido	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
23	Muhamad Anur	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
24	Dafit Al Arif	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
25	Afkaizul	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
26	Aldiansyah Rezza Saputra	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
27	Muhamad Al Pais	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
28	Muhamad Arief	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
29	Egi Meldiansyah	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)
30	Muhamad Ridwan	SMPN 2 Kecamatan Bandung	Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja (AMPK)

d) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

Dengan pagu sebesar Rp 44.159.102 - dan realisasi sebesar Rp 44.159.102 atau capaian sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan ini yaitu pemberian honorarium petugas RPS sebanyak 2 orang dan belanja perjalanan Dinas.

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Sutoko	Petugas RPS
2	Ikhyal Kirom	Petugas RPS

Dokumentasi Aktivitas Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan



5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program perlindungan dan jaminan sosial memiliki pagu sebesar Rp. 1.421.957.364 dengan realisasi Rp. 1.145.371.380 atau capaian sebesar 80,55%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan diantaranya :

1) Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

Dengan pagu sebesar Rp. 1.421.957.364 dan realisasi sebesar Rp. 1.145.371.380 atau capaian sebesar 80,55 %.

- **Output Kegiatan** yaitu Pemberian Bantuan Sosial, Pendataan PMKS dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan yang disalurkan.

Dengan sub kegiatan yaitu:

a) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan pagu sebesar Rp. 583.167.264 - dan realisasi sebesar Rp. 348.400.380 atau capaian sebesar 59,74%

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu sosialisasi Up-dating perbaikan NIK kelayakan penerima Bansos, dan data PMKS.

b) Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Dengan pagu sebesar Rp. 41.990.100 - dan realisasi sebesar Rp. 22.255.000 atau capaian sebesar 53,00%

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu monitoring dan bimbingan terhadap pelaksanaan Program bantuan yang disalurkan oleh pusat.

c) Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Dengan pagu sebesar Rp 796.800.000, dan realisasi sebesar Rp. 774.716.000 atau capaian sebesar 97,23%

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu :

1. Pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 150 Orang:

No	Kecamatan	Nama Kelompok	Jenis Usaha	Penerima Bantuan (Orang)
1	Kibin	CIJERUK BERKARYA	SOUND SYSTEM	5
2	Cikande	GEMA INDAH	SOUND SYSTEM	5
3	Kragilan	KKSP, PEJUANG HIKMAH 1, PEJUANG HIKMAH 2	SOUND SYSTEM	15
4	Tunjung Teja	PEUJEUH, SUKA KARYA, KETEMENGGUNGAN	SOUND SYSTEM, TENDA, TENDA & KURSI	15

5	Pulo Ampel	MAJU USAHA BERSAMA	SOUND SYSTEM	5
6	Baros	SUKACAI BERKAH, TATA BERSAMA, NURUDZULAM	SOUND SYSTEM, TENDA	15
7	Waringinkurung	SUKSES BERSAMA, MAKMUR BERSAMA	SOUND SYSTEM, TENDA	10
8	Cinangka	SUMBER BERKAH, MAKMUR	SOUND SYSTEM, TENDA	10
9	Petir	BOJONG WETAN, PANYAIRAN MAJU	SOUND SYSTEM, TENDA DAN KURSI	10
10	Bandung	KARYA MUDA TENDA, BABAKAN MAJU. MEKAR KARYA, MANDER MANDIRI	SOUND SYSTEM, TENDA DAN KURSI	20
11	Ciruas	RAJAWALI DUA PULUH	SOUND SYSTEM	5
S12	Binuang	SAMUDRA	SOUND SYSTEM	5
13	Cikeusal	JAYA ABADI	TENDA	5
14	Pamarayan	JASA MANDIRI KOLAMBU ALA	TENDA DAN KURSI	5
15	Mancak	WALI SUMUR	TENDA DAN KURSI	5
16	Ciomas	KARYA MUDA, MAKMUR	TENDA DAN KURSI	10
17	Tirtayasa	SUJUNG MAKMUR	WARUNGAN	5
Jumlah				150 Orang

2. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 100 Orang, berikut rekap per Kecamatan:

No	Kecamatan	Nama Kelompok	Jenis Usaha	Penerima Bantuan (Orang)
1	Cikande	BAKUNG BERKARYA	TATABOGA	5
2	Tunjung Teja	BOGA KARYA	TATABOGA	5
3	Baros	UEP SUKACAI, UEP SUKAMENAK	TATABOGA	20
4	Ciruas	PUTRI MALU	TATABOGA	5
5	Tanara	TENJO MANDIRI	TATABOGA	5
6	Kramatwatu	PEGADINGAN MAJU	TATABOGA	5
7	Pamarayan	PAMARAYAN KARYA, UEP PAMARAYAN	TATABOGA	10
8	Petir	KATAPURA MAJU JAYA	TATABOGA	5
9	Jawilan	MAJASARI BANGKIT	TATABOGA	5
10	Pabuaran	BINANGKIT	TATABOGA	5
11	Anyar	JAYA SEJAHTERA	TATABOGA	5
12	Ciangka	SEJAHTERA	TATABOGA	5
13	Ciomas	HARAPAN, KARYA BERSAMA	TATABOGA	10
14	Mancak	SIGEDONG MANDIRI	TATABOGA	5
15	Tirtayasa	UEP PONTANG LEGON	TATABOGA	5
JUMLAH				100 Orang

Dokumentasi Aktifitas program Perlindungan dan Jaminan Sosial



6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program Penanganan Bencana memiliki pagu sebesar Rp. 1.183.367.800 dengan realisasi Rp.1.108.562.200 atau capaian sebesar 93,68%.

Program ini dilaksanakan melalui dua Kegiatan dan empat Sub kegiatan diantaranya :

- 1) **Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota,**
Dengan pagu sebesar Rp. 791.819.700,- dan realisasi sebesar Rp. 770.249.850 atau capaian sebesar 97,28 %.

- **Output Kegiatan** yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana

Dengan sub kegiatan yaitu :

- a) **Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan**

Dengan pagu Rp. 649.350.000 dan realisasi sebesar Rp. 629.187.650 atau capaian sebesar 96,89%

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu penyediaan Bufferstock dengan jumlah 8412 orang tersalurkan dalam 1 Tahun.

No	Kecamatan	Jumlah Bencana	Kepala Keluarga (KK)	Anggota Rumah Tangga (Jiwa)
1	ANYAR	7	38	76
2	BANDUNG	7	6	22
3	BAROS	16	65	160
4	BINUANG	1	2	7
5	BOJONEGARA	1	1	3
6	CARENANG	22	35	118
7	CIKANDE	11	1.005	3.373
8	CIKEUSAL	23	238	602
9	CINANGKA	24	249	425
10	CIOMAS	6	47	194
11	CIRUAS	9	13	52
12	GUNUNGSARI	12	13	62
13	JAWILAN	3	101	306
14	KIBIN	4	82	90
15	KOPO	14	610	658
16	KRAGILAN	9	22	71
17	KRAMATWATU	5	53	53
18	LEBAKWANGI	3	7	30
19	MANCAK	14	30	89
20	PABUARAN	8	11	30
21	PADARINCANG	5	635	688
22	PAMARAYAN	9	19	45
23	PETIR	15	77	263
24	PONTANG	4	66	248
25	PULOAMPEL	3	409	412

26	TANARA	2	1	1
27	TIRTAYASA	2	2	8
28	TUNJUNGTEJA	7	90	263
29	WARINGINKURUNG	12	40	63
Jumlah		258	3.967	8.412

b) Sub Kegiatan penyediaan Sandang

Dengan pagu sebesar Rp. 100.070.000 - dan realisasi sebesar Rp 98.919.500 atau capaian sebesar 98,85%

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu pemberian sandang kepada korban bencana dengan jumlah 488 orang yang di bantu.

NO	KECAMATAN	JUMLAH BENCANA	KEPALA KELUARGA (KK)	ANGGOTA RUMAH TANGGA (Jiwa)
1	ANYAR	3	9	28
2	BANDUNG	3	3	10
3	BAROS	3	9	19
4	BINUANG	1	2	7
5	BOJONEGARA			
6	CARENANG	5	7	23
7	CIKANDE	1	1	1
8	CIKEUSAL	2	6	25
9	CINANGKA	7	31	81
10	CIOMAS			
11	CIRUAS	4	5	22
12	GUNUNGSARI	5	5	20
13	JAWILAN	1	1	4
14	KIBIN	1	5	10
15	KOPO	5	10	33
16	KRAGILAN	2	3	13
17	KRAMATWATU	2	3	3
18	LEBAKWANGI	2	5	23
19	MANCAK	5	7	17
20	PABUARAN	4	6	17
21	PADARINCANG	1	1	3

22	PAMARAYAN	5	12	31
23	PETIR	5	15	64
24	PONTANG	1	1	1
25	PULOAMPEL			
26	TANARA			
27	TIRTAYASA	1	1	3
28	TUNJUNGTEJA	3	5	22
29	WARINGINKURUNG	2	2	8
JUMLAH		74	155	488

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten

Dengan pagu sebesar Rp. 42.399.700 dan realisasi sebesar Rp. 42.142.700 atau capaian sebesar 99,39%.

- **Output Kegiatan** yaitu pembinaan dan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana.

Dengan Sub Kegiatan Yaitu :

a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Dengan pagu sebesar Rp 25.511.900 dan realisasi sebesar Rp. 25.308.200 atau capaian sebesar 99,20%.

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu rapat koordinasi dengan dua kecamatan yaitu cinangka dan anyar yang berjumlah 120 orang.

b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Taruna Siaga Bencana

Dengan pagu sebesar Rp 16.887.800 dan realisasi sebesar Rp 16.834.500 - atau capaian sebesar 99,68%.

- **Output Sub Kegiatan** ini yaitu rapat kordinasi di kantor dinas sosial yang berjumlah 60 orang petugas tagana.

Dokumentasi Aktivitas Program Penanganan Bencana



3.2. Realisasi Anggaran

Data yang disajikan merupakan hasil Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Kabupaten Serang Per Tanggal 31 Desember 2024.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.926.957.681	7.062.602.670	89,10
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.278.150	29.216.900	76,33
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.611.900	13.311.400	97,79
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.277.850	1.022.000	79,98
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.906.000	2.240.000	117,52
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.642.400	12.643.500	71,67
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.840.000	-	0,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.183.299.000	5.730.297.665	92,67
8	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	6.183.299.000	5.730.297.665	92,67
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	594.414.072	399.645.143	67,23
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.971.700	6.941.900	99,57
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.082.000	17.100.000	21,35
12	Penyediaan bahan logistik kantor	45.290.600	34.334.000	75,81
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.597.000	24.077.000	81,35
14	Penyediaan Bahan- Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.200	13.513.000	54,05
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.472.572	303.679.243	74,53

4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.629.459	752.227.262	90,24
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	499.658.200	438.158.703	87,69
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.971.259	314.068.559	94,04
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.337.000	151.215.700	54,52
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.337.000	151.215.700	54,52
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.065.805.803	1.062.686.403	99,71
6	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten.Kota	13.538.750	10.634.750	78,55
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	13.538.750	10.634.750	78,55
7	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.052.267.053	1.052.051.653	99,98
20	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
21	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	416.486.400	416.483.500	100,00
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.920.000	1.920.000	100,00
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	611.878.753	611.692.153	99,97
24	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	21.981.900	21.956.000	99,88
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAN KEKERASAN	5.950.000	5.925.000	99,58
8	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan.	5.950.000	5.925.000	99,58
25	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5.950.000	5.925.000	99,58

4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	228.176.405	171.383.897	75,11
9	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	136.462.803	82.859.795	60,72
26	Penyediaan Permakanan	24.117.400	19.630.000	81,39
27	Penyediaan Sandang	12.329.600	6.145.000	49,84
28	Penyediaan Alat Bantu	6.000.000	1.775.000	29,58
29	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.700.000	2.325.000	49,47
30	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	47.660.803	23.391.795	49,08
31	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	24.055.000	17.993.000	74,80
32	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.900.000	2.650.000	67,95
33	Pemberian Layanan Kedaruratan	3.975.000	3.350.000	84,28
34	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.625.000	1.800.000	32,00
35	Pemberian Layanan Rujukan	4.100.000	3.800.000	92,68
10	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	91.713.602	88.524.102	96,52
36	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.575.000	2.100.000	81,55
37	Penyediaan Permakanan	-	-	
38	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	18.350.000	18.150.000	98,91
39	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	26.629.500	24.115.000	90,56
40	Pemberian layanan Rujukan	44.159.102	44.159.102	100,00
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.421.957.364	1.145.371.380	80,55
11	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1.421.957.364	1.145.371.380	80,55
41	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	583.167.264	348.400.380	59,74
42	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	41.990.100	22.255.000	53,00
43	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	796.800.000	774.716.000	97,23

6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	791.819.700	770.249.850	97,28
12	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	749.420.000	728.107.150	97,16
44	Penyediaan Makanan	649.350.000	629.187.650	96,89
45	Penyediaan Sandang	100.070.000	98.919.500	98,85
13	Kegiatan Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	42.399.700	42.142.700	99,39
46	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	25.511.900	25.308.200	99,20
47	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	16.887.800	16.834.500	99,68
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	80.726.350	80.166.550	99,31
14	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	80.726.350	80.166.550	99,31
48	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	54.726.350	54.166.550	98,98
49	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.000.000	26.000.000	100,00
Total Belanja		11.521.393.303	10.298.385.750	89,38

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1. Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Serang memperlihatkan pencapaian Evaluasi kinerja sasaran strategis dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- 4.1.2. Dalam rangka mencapai target indikator kinerja urusan sosial tahun 2024, alokasi anggaran tahun 2024 untuk urusan sosial sebesar Rp. 11.521.393.303,- dengan realisasi mencapai Rp 10.298.385.750,- atau 89,38%.

4.2. Rekomendasi

- 4.2.1. Dalam penyusunan Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan serta target kinerja OPD harus berpedoman pada Rencana Strategis OPD sehingga tercipta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran OPD.
- 4.2.2. Untuk menghindari menurunnya realisasi anggaran maka diharapkan PPTK/KPA dapat lebih awal melaksanakan kegiatannya dan merencanakan anggaran kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan biaya sehingga realisasi tidak terlalu berbeda dengan anggaran yang tersedia
- 4.2.3. Evaluasi dan pelaporan perlu secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi secara internal agar progres report dari pelaksanaan dapat diketahui dan diantisipasi bila mengalami keterlambatan
- 4.2.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan harus dioptimalkan untuk mengetahui progres report dari setiap program/kegiatan sehingga hambatan/kendala yang mungkin dihadapi dapat diantisipasi lebih cepat untuk kemudian merumuskan solusi yang tepat.

Serang, 03 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG**



Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002